


Analisis Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan terhadap Pendapatan dan Profesionalitas Perempuan di Pulau Sulawesi

Mughni Latifah^{1*}, Alamsyah Agit², Andi Athifah Amalia Achruh P³, Suhartono⁴

¹⁻⁴Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Jl. Sultan Alauddin No. 63, Kota Makassar

E-mail: mughni.latifah@uin-alauddin.ac.id

* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v5i1.7279>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 05 June 2026

Revised: 22 June 2026

Accepted: 04 July 2026

Kata Kunci:

Pembangunan Gender,
Pemberdayaan Gender,
Kontribusi Pendapatan
Perempuan,
Profesionalisme
Perempuan

Keywords:

Gender Development,
Gender Empowerment,
Women Income
Contribution, Women
Professionalism

ABSTRACT

Studi ini menganalisis perkembangan dan pemberdayaan gender di Sulawesi dengan fokus pada kesenjangan antara kemajuan pembangunan manusia perempuan dan kontribusi ekonomi mereka. Penelitian menggunakan desain metode campuran (mixed methods) melalui analisis data Badan Pusat Statistik dan telaah 30 artikel ilmiah, yang dipadukan dengan analisis deskriptif, tematik, interpretatif, triangulasi, dan integrasi naratif. Hasil menunjukkan bahwa perkembangan gender telah melampaui 90%, sedangkan pemberdayaan gender masih berkisar 70–75%. Kontribusi pendapatan perempuan hanya sekitar 33%, sementara profesionalisme perempuan mencapai 55% tetapi masih terkonsentrasi pada sektor pendidikan, kesehatan, administrasi, dan pekerjaan teknis, bukan pada posisi kepemimpinan. Kondisi ini mencerminkan masih adanya segregasi pekerjaan, norma patriarki, beban pengasuhan, dan terbatasnya akses ke sektor bernilai tinggi. Studi menyimpulkan bahwa kemajuan pembangunan manusia perempuan belum diikuti pemberdayaan ekonomi yang memadai, sehingga diperlukan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih inklusif, penguatan dukungan pengasuhan, serta perluasan akses perempuan ke kepemimpinan dan sektor produktif.

This study analyzes gender development and empowerment in Sulawesi, focusing on the gap between women's human development progress and their economic contribution. The study employed a mixed-methods design, analyzing data from the Central Statistics Agency (BPS) and reviewing 30 scientific articles, combined with descriptive, thematic, interpretive, triangulation, and narrative integration analyses. The results indicate that gender development has exceeded 90%, while gender empowerment remains at around 70–75%. Women's income contribution is only around 33%, while women's professionalism reaches 55%, but remains concentrated in education, health, administration, and technical work, rather than in leadership positions. This reflects persistent occupational segregation, patriarchal norms, caregiving burdens, and limited access to high-value sectors. The study concludes that progress in women's human development has not been accompanied by adequate economic empowerment, necessitating more inclusive employment policies, strengthened caregiving support, and expanded women's access to leadership and the productive sector.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.



How to Cite: Mughni Latifah, et al (2026). Analisis Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan Terhadap Pendapatan dan Profesionalitas Perempuan di Pulau Sulawesi, 5(1) 360-368. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v5i1.7279>

PENDAHULUAN

Pembangunan dan pemberdayaan gender merupakan indikator makro penting yang digunakan untuk mengukur kesetaraan gender. Pembangunan gender berfokus pada beberapa dimensi dasar pembangunan manusia, termasuk pendidikan, kesehatan, dan standar hidup (Charmes dkk., 2023). Sementara itu, pemberdayaan gender lebih berfokus pada peran perempuan dalam bidang sosial,

ekonomi, dan politik (Cynthia dkk., 2023). Kedua indikator ini telah menggantikan indeks ketidaksetaraan gender dan telah membantu banyak negara melacak tren kesetaraan gender yang saat ini mengalami kemunduran karena pandemi 2019. Pembangunan dan pemberdayaan gender di Indonesia menunjukkan peningkatan yang lambat dan berfluktuasi, dengan indeks pembangunan gender rata-rata 90 persen dan indeks pembangunan gender yang tetap berada di angka 75 persen selama beberapa tahun terakhir (Khairani dkk., 2022). Persentase ini juga masih ditandai dengan disparitas antarprovinsi yang tajam dan bervariasi di berbagai wilayah, yang juga tercermin dalam skor terendah di Papua (Nurdin, 2024).

Banyak kebijakan terkait pemberdayaan perempuan telah dikeluarkan untuk mempromosikan peran perempuan di berbagai bidang, khususnya sektor ekonomi. Namun, partisipasi ini masih menghadapi berbagai keterbatasan dan hambatan sistematis dan struktural yang saling terkait, seperti budaya patriarki dan stereotip gender yang menempatkan perempuan di ranah domestik, membatasi akses perempuan terhadap sumber daya dan pengambilan keputusan yang tidak konsisten dengan kerangka hukum untuk kesetaraan gender (Sharma dkk., 2023). Tuntutan peran ganda perempuan juga tetap menjadi penghalang yang mengurangi mobilitas perempuan di pasar tenaga kerja formal. Lebih lanjut, berbagai peraturan diskriminatif yang membatasi peluang kerja perempuan di sektor-sektor tertentu, perlindungan kerja yang tidak memadai, pembatasan akses finansial dan material, dan pemberlakuan kondisi kerja yang memberatkan (Amarasooriya dkk., 2024). Ketidaksetaraan ini membutuhkan komitmen untuk menerapkan peraturan dan mekanisme yang dapat mendorong pencapaian kesetaraan gender, yang seringkali gagal karena kurangnya kemauan politik, resistensi budaya yang tinggi, dan formulasi yang tidak responsif terhadap gender. Jika tidak segera ditangani, masalah ini dapat menyebabkan pelanggaran status quo.

Kemajuan teknologi dan inovasi mendorong perubahan regulasi yang terus memberikan akses yang setara bagi perempuan. Secara global, pencapaian pendidikan perempuan telah menunjukkan kemajuan pesat, sebagaimana tercermin dalam proporsi lulusan universitas di bidang sains dan teknik di negara-negara Asia. Namun, kemampuan ini tidak selalu berbanding lurus dengan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan, sebuah realitas yang menunjukkan kesenjangan gender (Arcillas dkk., 2024). Kompleksitas hubungan antara pendidikan dan kesiapan kerja menunjukkan perlunya regulasi yang dapat memberikan akses yang setara bagi perempuan untuk terlibat dalam berbagai sektor. Hambatan-hambatan ini pada akhirnya berasal dari norma gender, diskriminasi budaya, dan tuntutan peran ganda perempuan (Hong dkk., 2023). Hambatan-hambatan ini memerlukan intervensi kebijakan afirmatif seperti dukungan fiskal untuk fasilitas penitipan anak dan program pasar tenaga kerja aktif untuk mengoptimalkan transisi perempuan ke dalam sistem ekonomi (Howard dkk., 2024).

Pengembangan dan pemberdayaan perempuan sangat penting, keduanya mengarah pada pencapaian pembangunan berkelanjutan. SDG 4 membahas penyediaan pendidikan berkualitas, dan SDG 5 secara eksplisit mempromosikan kesetaraan gender (Fadil dkk., 2023). Kedua agenda ini saling terkait dan tidak terpisahkan. Meningkatkan kualitas dan akses pendidikan dianggap sebagai langkah strategis yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi inklusif. Implementasi agenda ini akan memberikan peluang bagi perempuan untuk berkontribusi pada produktivitas dan pembangunan makroekonomi (Saputri dkk., 2024). Inisiatif ini telah tercermin secara luas dalam beberapa program prioritas di Indonesia, seperti Kartu Indonesia Pintar, yang telah berhasil mengurangi angka kemiskinan sekaligus meningkatkan angka pendaftaran sekolah. Program lain, seperti program pra-kerja, secara bersamaan mendorong pencapaian SDG 4, 5, dan 8 dengan meningkatkan kapasitas keterampilan tenaga kerja lintas gender (Safitri dkk., 2022). Oleh karena itu, sinergi komprehensif antara cakupan pendidikan yang merata dan perluasan partisipasi ekonomi diperlukan untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan gender serta meminimalkan risiko stagnasi dan kegagalan dalam mencapai SDGs secara optimal (Serena dkk., 2024).

Indonesia telah menetapkan kerangka kebijakan kesetaraan gender yang selaras dengan tujuan pembangunan nasional. Namun, analisis rencana pembangunan nasional menunjukkan bahwa perspektif gender belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam kebijakan dan sebagian besar masih bersifat formal (Farazila dkk., 2023). Secara empiris, terdapat banyak keberhasilan parsial dalam konteks gender, seperti pengurangan ketidaksetaraan gender pada tahun 2022, dan kesetaraan gender dalam pendidikan dan kesehatan, yang berkorelasi positif dengan pembangunan ekonomi di Sumatera Barat. Pengurangan ketidaksetaraan gender juga terbukti meningkatkan penerimaan pajak penghasilan dan memperluas kesempatan kerja (Lukman, 2024). Banyak kesenjangan yang perlu dianalisis untuk memberdayakan

perempuan dalam pendidikan dan ekonomi. Misalnya, banyak penelitian menemukan bahwa peningkatan pendidikan perempuan tidak selalu disertai dengan peningkatan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja (Setyonaluri & Utomo, 2024). Di Indonesia, penelitian serupa menunjukkan korelasi negatif antara tingkat pendidikan dan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja (Sofa & Eschachasthi, 2024). Di Malaysia, perluasan pendidikan juga terbukti tidak menunjukkan korelasi positif dengan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja. Meskipun dianggap bahwa mekanisme atau kondisi pasar tenaga kerja diperlukan untuk meningkatkan partisipasi ini, studi di kawasan Asia menunjukkan bahwa kondisi tersebut masih sangat terbatas karena kebijakan dan regulasi yang bias (Saha & Singh, 2025). Di sisi lain, penelitian yang membahas ketidaksetaraan telah banyak dilakukan, tetapi penelitian yang mengintegrasikan gender, pendidikan, ekonomi, dan ketidaksetaraan dalam satu kerangka kerja masih sangat terbatas (Wihardja & Pradana, 2024). Secara keseluruhan, literatur yang ada menyerukan analisis simultan tentang pendidikan, partisipasi ekonomi perempuan, dan kesetaraan gender dalam satu kerangka kerja untuk memperdalam pemahaman tentang pengalaman perempuan di kedua sektor ini, khususnya di Indonesia.

Berdasarkan konseptualisasi empiris, teori, dan fenomena yang sering ditemui dalam konteks kesetaraan gender, diketahui bahwa hambatan utama yang sering ditemui berkaitan dengan kebijakan dan regulasi yang mengarah pada pembangunan dan pemberdayaan gender. Di Indonesia, pembangunan dan pemberdayaan gender dianggap telah diimplementasikan secara bertahap, namun belum ada peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Meskipun demikian, analisis mendalam diperlukan untuk menyoroti dampak pembangunan dan pemberdayaan gender di Indonesia. Studi ini bertujuan untuk menganalisis potensi dampak pembangunan dan pemberdayaan gender terhadap kontribusi perempuan di berbagai sektor, serta mengukur partisipasi angkatan kerja perempuan di berbagai sektor di Indonesia.

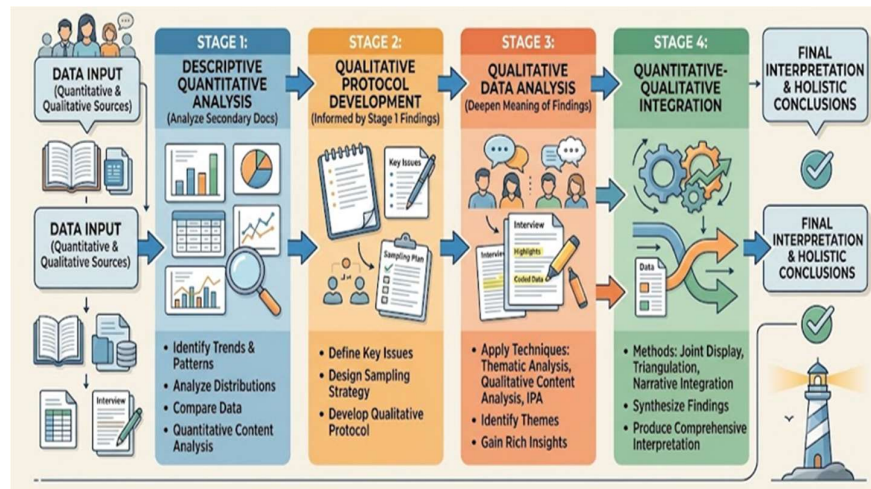
METODE

Analisis perkembangan dan pemberdayaan gender memerlukan penelitian dengan pendekatan metodologis yang mampu memetakan kompleksitas multidimensional dari fenomena yang diteliti (Abrar, 2024). Dalam menganalisis hubungan antara variabel pembangunan dan pemberdayaan gender, pendekatan tunggal dianggap tidak cukup untuk menjelaskan aspek-aspek yang terkandung dalam kedua indikator tersebut. Untuk melakukan penelitian ini, pendekatan yang menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif direkomendasikan. Dengan menerapkan kedua pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menyajikan perspektif yang menghasilkan kebenaran dan pemahaman yang lebih komprehensif (Rafiuddin dkk., 2024). Desain yang digunakan adalah sekuensial eksploratif, memprioritaskan analisis kuantitatif untuk menyajikan data secara representatif, diikuti oleh pendekatan kualitatif untuk memperdalam makna yang terkandung dalam data yang disajikan. Dengan demikian, hasil penelitian ini secara argumentatif lebih kuat untuk mendukung temuan yang diperoleh.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik terkait gender seperti indeks pembangunan gender, indeks pemberdayaan gender, pendapatan perempuan, dan profesi perempuan. Selain itu, data yang digunakan juga mencakup penelitian yang relevan dengan pembahasan gender. Untuk memastikan artikel yang digunakan dalam penelitian ini relevan dengan pembahasan utama, kriteria inklusi berikut digunakan: (1) Artikel yang digunakan adalah artikel penelitian dan artikel ulasan; (2) Artikel yang digunakan adalah artikel yang diterbitkan dalam 10 tahun terakhir; (3) Artikel yang digunakan adalah artikel yang telah melalui proses peer-review; (4) Artikel yang digunakan adalah artikel yang menggunakan bahasa Indonesia dan Inggris; dan (5) Artikel yang digunakan secara khusus membahas pembangunan dan pemberdayaan gender. Berdasarkan proses inklusi yang diterapkan, diperoleh 29 artikel yang paling relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini, selanjutnya artikel-artikel ini akan digunakan untuk mendukung temuan dalam penelitian ini.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui empat tahapan yang saling terkait. Tahapan pertama menggunakan analisis kuantitatif deskriptif untuk mengidentifikasi tren, pola, distribusi, dan perbandingan data melalui tabel, grafik, visualisasi, dan analisis konten kuantitatif dari dokumen sekunder. Tahapan kedua mengembangkan protokol kualitatif berdasarkan temuan awal, seperti mengidentifikasi isu-isu utama dan pengambilan sampel. Tahapan ketiga menerapkan analisis tematik, analisis konten kualitatif, atau Analisis Fenomenologi Interpretatif (IPA) untuk memperdalam

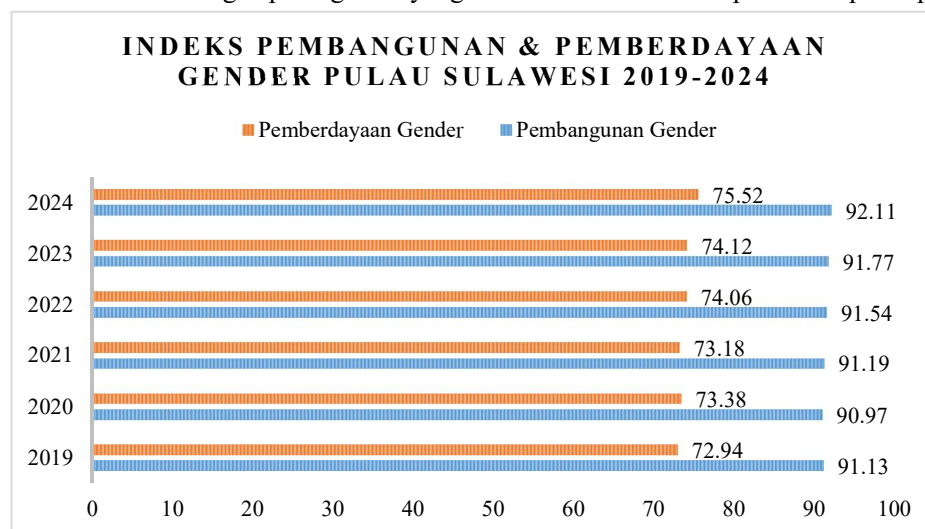
makna temuan. Tahapan terakhir mengintegrasikan hasil kuantitatif dan kualitatif melalui tampilan bersama, triangulasi, dan integrasi naratif untuk menghasilkan interpretasi yang lebih komprehensif.



Gambar 1. Kerangka Konsep Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa gambaran pembangunan gender di wilayah ini dapat dilihat melalui dua indikator utama: Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender. Kedua indikator ini memberikan informasi tentang sejauh mana perempuan memiliki akses yang setara terhadap aspek-aspek dasar pembangunan, seperti kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, sekaligus menunjukkan tingkat keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan dan kegiatan produktif. Oleh karena itu, analisis kedua indeks ini penting untuk menilai apakah kemajuan pembangunan di wilayah ini telah disertai dengan peningkatan yang lebih substansial dalam posisi dan peran perempuan.

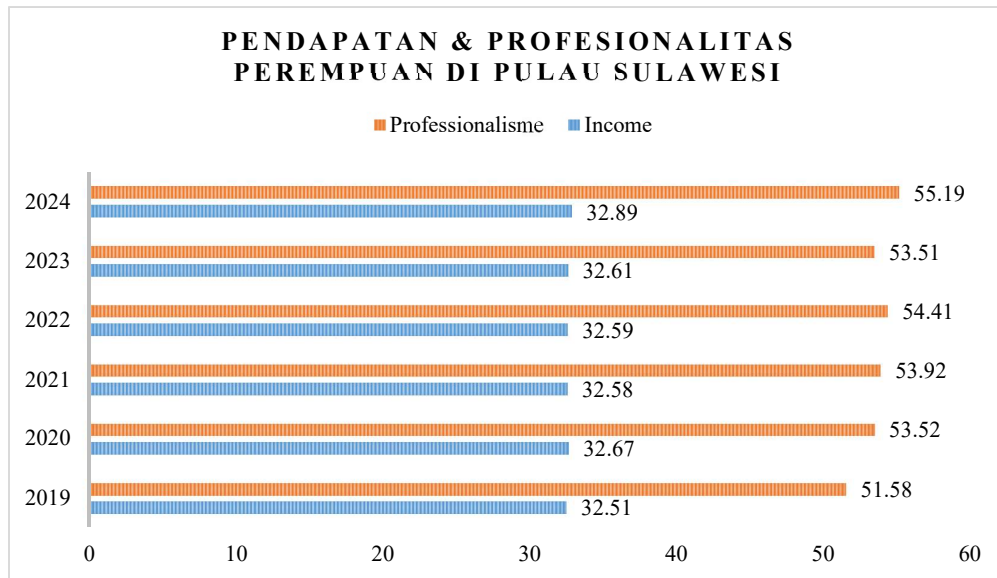


Gambar 2. Indeks Pembangunan & Pemberdayaan Gender Pulau Sulawesi 2019-2024

Indeks Pembangunan Gender (GDI) sebesar 90% dan Indeks Pemberdayaan Gender (GDI) sebesar 70% menunjukkan bahwa suatu daerah telah mencapai tingkat pembangunan gender yang relatif baik, meskipun masih ada ruang untuk perbaikan dalam aspek pemberdayaan perempuan. GDI, yang merupakan rasio perbandingan antara Indeks Pembangunan Manusia perempuan dan laki-laki, menunjukkan bahwa pencapaian pembangunan manusia perempuan di daerah tersebut telah mencapai 90% dari pencapaian laki-laki, menyisakan kesenjangan sekitar 10% (Yunara dkk., 2023). Nilai ini menunjukkan kondisi yang tinggi, meskipun sedikit di bawah rata-rata nasional Indonesia pada tahun 2021 sebesar 91,27%, dan menunjukkan bahwa kesenjangan gender dalam aspek kesehatan, pendidikan,

dan ekonomi relatif kecil karena nilai GDI membaik ketika mendekati 100 (Asefino & Wijayanto, 2024). Sementara itu, IDG sebesar 70% menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam bidang ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan cukup baik, meskipun belum optimal, terutama karena indikator ini masih sangat dipengaruhi oleh rendahnya representasi perempuan di parlemen dan posisi strategis lainnya (Pellu, 2024). Secara keseluruhan, kombinasi kedua nilai ini menunjukkan bahwa wilayah ini telah membuat kemajuan yang relatif dalam mewujudkan kesetaraan pembangunan manusia berbasis gender, tetapi masih menghadapi tantangan dalam memperkuat pemberdayaan perempuan di ranah publik, khususnya dalam aspek representasi, profesionalisme, dan kontribusi terhadap pengambilan keputusan, yang pada akhirnya juga terkait dengan peningkatan pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi regional (Setiani dkk., 2024).

Kesenjangan antara Indeks Pembangunan Gender (GDI), yang telah melampaui 90%, dan Indeks Pemberdayaan Gender (GED), yang masih berada di sekitar 75%, mencerminkan apa yang dapat dipahami sebagai paradoks antara kemampuan dan peluang pembangunan. Secara konseptual, GDI yang tinggi menunjukkan bahwa perempuan telah menikmati kemajuan signifikan dalam dimensi dasar pembangunan manusia, khususnya kesehatan, pendidikan, dan standar hidup, sebagaimana tercermin dalam peningkatan harapan hidup, akses ke pendidikan menengah dan tinggi, dan peningkatan pengeluaran per kapita. Dalam konteks wilayah Sulawesi, berdasarkan dinamika data BPS tahun 2024–2025, kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan dalam memenuhi hak-hak dasar perempuan belum diikuti secara merata oleh peningkatan representasi perempuan di parlemen, akses ke posisi manajerial, atau penguatan kontribusi ekonomi mereka. Hambatan-hambatan ini terkait dengan persistensi segregasi pasar tenaga kerja yang kuat, keberadaan "langit-langit kaca" (*Glass Ceiling*), dominasi perempuan di sektor informal yang lebih fleksibel tetapi berpenghasilan lebih rendah, dan norma-norma sosial budaya yang masih menempatkan perempuan terutama dalam peran domestik. Namun, Sulawesi Utara menunjukkan bahwa kondisi ini tidak seragam, karena provinsi ini mencatatkan IDG tertinggi secara nasional pada tahun 2024, yang mengindikasikan bahwa struktur sosial yang lebih terbuka dapat mendorong partisipasi perempuan yang lebih besar dalam kepemimpinan dan kegiatan ekonomi.



Gambar 3. Indeks Pendapatan & Profesionalitas Perempuan 2019-2024

Kontribusi pendapatan rata-rata perempuan, yang hanya mencapai 33 persen, menunjukkan bahwa kesetaraan gender di sektor ekonomi belum terwujud secara memadai dan mencerminkan ketidaksetaraan struktural yang terus berlanjut. Angka ini tidak hanya mencerminkan rendahnya bagian pendapatan yang diterima perempuan dibandingkan dengan laki-laki, tetapi juga menunjukkan keterbatasan perempuan dalam mengakses pekerjaan yang layak dan bergaji tinggi serta posisi strategis di pasar tenaga kerja. Secara global, kondisi ini dikaitkan dengan diskriminasi upah, beban pekerjaan perawatan tanpa bayaran, dan segregasi pekerjaan yang menempatkan perempuan di sektor berpenghasilan rendah (Grown dkk., 2025). Lebih luas lagi, kontribusi pendapatan perempuan yang

rendah merupakan indikator penting ketidaksetaraan gender karena secara langsung berdampak pada otonomi ekonomi perempuan, daya tawar dalam rumah tangga, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan (Deza dkk., 2026). Lebih jauh lagi, kondisi ini juga meningkatkan risiko kemiskinan, terutama di rumah tangga yang bergantung pada pendapatan perempuan, dan pada tingkat makro dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperluas ketidaksetaraan pendapatan regional (Rofatunnisa & Usman, 2024). Dengan demikian, kontribusi pendapatan perempuan sebesar 33 persen harus dipahami sebagai sinyal bahwa hambatan terhadap kesetaraan gender masih kuat, baik dalam bentuk norma sosial patriarki, marginalisasi di pasar tenaga kerja, atau akses terbatas perempuan terhadap sumber daya ekonomi yang lebih produktif.

Kontribusi rata-rata sebesar 33 persen dari pendapatan perempuan dapat dipahami sebagai faktor utama yang menjelaskan mengapa Indeks Pemberdayaan Gender (GDI) di Sulawesi masih berada di sekitar 75 persen, meskipun Indeks Pembangunan Gender (GDI) telah melampaui 90 persen. Dalam kerangka pengukuran BPS, kontribusi pendapatan merupakan komponen kunci dari GDI, sehingga proporsi pendapatan perempuan yang rendah menunjukkan bahwa peningkatan prestasi perempuan di bidang pendidikan dan kesehatan belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi kekuatan ekonomi yang setara. Kondisi ini terkait dengan struktur ekonomi regional Sulawesi, yang sebagian besar didukung oleh sektor industri ekstraktif dan hilir, seperti pertambangan dan pengolahan logam, yang cenderung menyerap lebih banyak tenaga kerja laki-laki dengan upah lebih tinggi, sementara perempuan lebih terkonsentrasi di sektor perdagangan, jasa, dan pertanian subsisten yang bergaji lebih rendah. Lebih lanjut, partisipasi angkatan kerja perempuan masih jauh di bawah laki-laki, sebagian karena beban pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan yang lebih besar, sehingga banyak perempuan meninggalkan pekerjaan formal atau bekerja sebagai pekerja keluarga tanpa upah. Bahkan dengan tingkat pendidikan yang setara, perempuan masih menghadapi segregasi pekerjaan, karena akses mereka ke posisi manajerial, profesional, dan kepemimpinan relatif terbatas, sementara banyak yang tetap berada di pekerjaan administrasi atau jasa dengan upah yang stagnan. Meskipun peralihan sebagian perempuan ke sektor informal, UMKM, dan ekonomi gig menawarkan fleksibilitas waktu, hal itu seringkali disertai dengan pendapatan yang tidak stabil dan pelaporan kontribusi ekonomi yang kurang akurat.

Indeks profesionalisme perempuan sebesar 55 persen menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam pekerjaan formal di posisi manajerial, profesional, administratif, dan teknis telah mencapai tingkat yang relatif baik dalam konteks kesetaraan gender. Sebagai salah satu komponen Indeks Pemberdayaan Gender (GEM), bersama dengan representasi perempuan di parlemen dan kontribusi pendapatan perempuan, indikator ini mencerminkan bahwa sekitar 55 persen profesional di suatu wilayah adalah perempuan, sehingga melampaui ambang batas kesetaraan ideal sebesar 50 persen (Rifatin & Pramesti, 2024). Pencapaian ini menunjukkan pengakuan yang semakin meningkat terhadap kapasitas dan profesionalisme perempuan dalam angkatan kerja formal, yang pada gilirannya dapat memperkuat pemberdayaan gender, mendukung pembangunan daerah, dan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita (Yuslin, 2021). Namun, indikator ini masih perlu ditafsirkan dengan hati-hati karena tingkat profesionalisme perempuan yang tinggi tidak secara otomatis mencerminkan kesetaraan gender secara keseluruhan, mengingat IDG berfokus pada peran aktif perempuan di sektor ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan, yang berbeda dengan Indeks Pembangunan Gender (IDG) yang lebih menekankan pada kualitas pembangunan manusia di bidang kesehatan, pendidikan, dan aspek ekonomi dasar (Harirah. MS dkk., 2023). Dengan demikian, skor 55 persen dapat dipahami sebagai sinyal positif untuk kemajuan pemberdayaan perempuan, tetapi masih perlu dilihat bersamaan dengan indikator gender lainnya untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap.

Proporsi perempuan sebagai tenaga profesional sebesar 55 persen di Sulawesi menunjukkan kemajuan signifikan dalam akses perempuan ke pendidikan tinggi dan pekerjaan formal berbasis keterampilan, tetapi pencapaian ini belum secara otomatis diterjemahkan menjadi pemberdayaan ekonomi yang setara. Situasi ini mencerminkan paradoks dalam struktur angkatan kerja regional: perempuan memang secara kuantitatif mendominasi angkatan kerja profesional, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan sebagai guru, perawat, bidan, dan pegawai negeri sipil tingkat menengah. Namun, dominasi ini lebih banyak terjadi pada posisi profesional teknis dengan wewenang operasional, daripada pada posisi manajerial atau pengambilan keputusan yang menawarkan strategis dan kompensasi yang lebih tinggi. Dengan demikian, tingkat profesionalisme perempuan yang tinggi tidak selalu diterjemahkan langsung menjadi peningkatan kontribusi pendapatan atau pencapaian Indeks

Pemberdayaan Gender (PPN). Situasi ini さらに dipengaruhi oleh struktur ekonomi Sulawesi, yang pertumbuhannya sebagian besar didukung oleh industri ekstraktif, pertambangan, dan hilir logam dengan nilai tambah tinggi, tetapi masih didominasi oleh laki-laki. Sementara perempuan profesional lebih terkonsentrasi di sektor layanan sosial dan publik, di mana upah cenderung tetap dan lebih rendah. Akibatnya, meskipun perempuan telah berhasil memasuki dunia kerja profesional dalam jumlah besar, nilai ekonomi agregat yang mereka hasilkan masih tertinggal dibandingkan dengan laki-laki.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kontribusi dan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja di Sulawesi masih menjadi titik kritis dalam mencapai kesetaraan gender yang lebih substansial. Meskipun Indeks Pembangunan Gender telah melampaui 90 persen, yang menunjukkan bahwa perempuan telah menikmati kemajuan relatif dalam kesehatan, pendidikan, dan standar hidup, kemajuan ini belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam kekuatan ekonomi yang setara. Hal ini tercermin dalam Indeks Pemberdayaan Gender, yang masih berada di kisaran 70–75 persen, dan kontribusi pendapatan perempuan, yang rata-rata hanya 33 persen. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun perempuan mungkin telah meningkatkan modal manusia, partisipasi mereka di pasar tenaga kerja masih dibatasi oleh struktur kesempatan yang tidak setara, seperti akses terbatas ke pekerjaan bergaji tinggi, segregasi pasar tenaga kerja yang terus-menerus, dan beban berat pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan yang memaksa banyak perempuan untuk tetap berada di sektor informal, terlibat dalam pekerjaan keluarga tanpa bayaran, atau terlibat dalam pekerjaan fleksibel berpenghasilan rendah. Di sisi lain, indeks profesionalisme perempuan, yang mencapai 55 persen, menunjukkan bahwa perempuan memiliki kehadiran yang signifikan dalam pekerjaan formal berbasis keterampilan, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, administrasi, dan pelayanan publik. Namun, dominasi ini lebih banyak terjadi pada posisi profesional teknis, daripada posisi manajerial, strategis, atau kepemimpinan yang memiliki pengaruh lebih besar pada pengambilan keputusan dan penghasilan. Dalam konteks ekonomi Sulawesi, yang pertumbuhannya sebagian besar didukung oleh industri ekstraktif, pertambangan, dan industri hilir bernilai tinggi yang didominasi laki-laki, perempuan cenderung terkonsentrasi di sektor pelayanan sosial, di mana upah lebih rendah dan lebih kaku. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa masalah utama bukan lagi semata-mata akses perempuan terhadap pendidikan atau pekerjaan, melainkan rendahnya kualitas partisipasi perempuan dalam struktur ekonomi regional, khususnya dalam hal akses ke sektor produktif, posisi kepemimpinan, dan distribusi pendapatan yang lebih adil.

SIMPULAN

Studi ini menunjukkan bahwa di Sulawesi, kemajuan pembangunan gender relatif tinggi dalam aspek-aspek dasar, tercermin dalam Indeks Pembangunan Gender yang telah melampaui 90 persen, namun kemajuan ini belum diiringi dengan penguatan posisi perempuan di bidang ekonomi dan pengambilan keputusan, seperti yang terlihat pada Indeks Pemberdayaan Gender yang masih berada di kisaran 70-75 persen, kontribusi pendapatan perempuan yang rata-rata hanya 33 persen, dan dominasi perempuan dalam pekerjaan profesional yang lebih terkonsentrasi di sektor pendidikan, kesehatan, administrasi, dan pelayanan publik, daripada di posisi strategis, manajerial, atau sektor bernilai tambah tinggi. Diskusi inti menekankan paradoks antara peningkatan kemampuan dan keterbatasan peluang: perempuan telah maju dalam pendidikan, kesehatan, dan standar hidup, tetapi tetap terhambat oleh segregasi pasar kerja, beban pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan, norma-norma patriarki, dan akses terbatas ke pekerjaan formal bergaji tinggi. Kontribusi utama studi ini adalah menyajikan analisis terintegrasi yang menghubungkan pembangunan gender, pemberdayaan gender, profesionalisme perempuan, dan kontribusi ekonomi perempuan dalam satu kerangka regional, sehingga memperjelas bahwa isu utamanya bukan lagi sekadar akses ke pendidikan, tetapi kualitas partisipasi perempuan dalam struktur ekonomi. Implikasinya adalah kebijakan perlu bergeser dari pendekatan formal dan umum ke reformasi yang lebih struktural, seperti memperluas akses perempuan ke sektor produktif dan kepemimpinan, memperkuat perlindungan kerja, mendukung pengasuhan, dan kebijakan pasar tenaga kerja yang responsif gender. Dalam mengembangkan bidang ini, studi ini memperkaya studi gender dengan menyoroti kesenjangan antara akumulasi modal manusia dan hasil pemberdayaan ekonomi yang nyata. Untuk penelitian lebih lanjut, studi ini menyoroti perlunya analisis longitudinal dampak kebijakan, studi provinsi demi provinsi yang lebih peka terhadap konteks sosial budaya, dan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran sektor informal, UMKM, dan ekonomi gig dalam membentuk kontribusi ekonomi perempuan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang sudah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel ini.

REFERENSI

- Abrar, K. P. (2024). Expressive Arts Therapy's Impact on Trauma in Incarcerated Youth. *INSAN: Jurnal Psikologi Dan Kesehatan Mental*, 9(1), 108–133. <https://doi.org/10.20473/jpkm.v9i12024.108-133>
- Amarasooriya, D. N. P., Premarathna, S. P., & Rajadurei, S. (2024). An Analysis of the Obstructive Factors that Impact the Empowerment of Women Entrepreneurs in Sri Lanka. *Kelaniya Journal of Management*, 13(1), 41–55. <https://doi.org/10.4038/kjm.v13i1.7789>
- Arcillas, J. E. B., Romero, D. S., & Cabauatan, R. R. (2024). Influence of Women Head of Government on The Human Capital of Women in The Philippines, Indonesia, Thailand, and Vietnam. *Journal of Gender Related Studies*, 5(1), 31–57. <https://doi.org/10.47941/jgrs.2329>
- Aselnino, P., & Wijayanto, A. W. (2024). Analisis Perbandingan Metode Hierarchical dan Non-Hierarchical dalam Pembentukan Cluster Provinsi di Indonesia Berdasarkan Indikator Women Empowerment. *Indonesian Journal of Applied Statistics*, 6(1), 57–68. <https://doi.org/10.13057/ijas.v6i1.68876>
- Charmes, J., Wieringa, S. E., Ruzvidzo, T., & Rosalie, G. (2023). The African Gender and Development Index: An Engendered and Culturally Sensitive Statistical Tool. *Frontiers in Sociology*, 8(1), 1114095. <https://doi.org/10.3389/fsoc.2023.1114095>
- Cynthia, C., Laurensia, T. S., & Perangin-Angin, R. B. (2023). Analisis Pelaksanaan Virtual Event “Equal” Bertemakan Kesetaraan Gender Di Bidang Ekonomi di Tengah Pandemi Covid-19. *Journal of Economics and Business UBS*, 12(4), 2562–2574. <https://doi.org/10.52644/joeb.v12i4.449>
- Deza, M. C., Dondo, M., Jara, H. X., Rodriguez, D., & Torres, J. (2026). The Role of Tax-Benefit Systems in Reducing the Gender Income Gap in Latin America. *Social Policy & Administration*, 60(3), 390–408. <https://doi.org/10.1111/spol.70001>
- Fadil, K., Suhendra, S., & Amran, A. (2023). Analisis Kebijakan Pendidikan Negara-negara ASEAN dalam Mendukung Sustainable Developments Goal. *ISLAMIKA: Jurnal Keislaman Dan Ilmu Pendidikan*, 5(1), 279–295. <https://doi.org/10.36088/islamika.v5i1.2778>
- Farazila, E., Riani, N. Z., & Rahmizal, M. (2023). Analisis Kesetaraan Gender Terhadap Pembangunan Perekonomian Daerah Wilayah Pro Gender di Kabupaten/Kota Sumatera Barat. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 5(4), 57–68. <https://doi.org/10.24036/jkep.v5i4.15578>
- Grown, C., Floro, M., & Onyechi, O. (2025). Sustainable Development and Gender Well-Being. *Environmental Research: Climate*, 4(2), 025013. <https://doi.org/10.1088/2752-5295/add363>
- Harirah, MS, Z., Marta, A., & Isril, I. (2023). Pergulatan Advokasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender di Kota Pekanbaru. *Journal of Social and Policy Issues*, 135–139. <https://doi.org/10.58835/jspi.v3i3.200>
- Hong, P. Y. P., Holland, B., Park, J. H., & Kim, C. K. (2023). Broken Links in The Workforce Development System: The Social-Human Development Need for Assessing Psychological Self-Sufficiency. *Social Development Issues*, 44(3), 1–22. <https://doi.org/10.3998/sdi.3708>
- Howard, K. E., Howard, N. R., Havard, D. D., & Wall, A. F. (2024). Career and Technical Education's Unequal Dividends for High School Students: The Stratification of a New Generation. *Urban Education*, 59(5), 1586–1618. <https://doi.org/10.1177/00420859211073890>
- Khairani, A., Abdurahman, A. I., Azzahra, A. S., & Khairunnisa, I. Z. (2022). Persepsi dan Sikap Masyarakat Kota Tangerang Terhadap Pemberdayaan Perempuan. *Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi*, 6(2), 315–322. <https://doi.org/10.51544/jlmk.v6i2.3395>
- Lukman, J. P. (2024). Pemberdayaan Perempuan Sebagai Poros Utama Pembangunan Berkelanjutan: Membangun Kesetaraan, Kesejahteraan, Dan Keseimbangan Lingkungan. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 2(8), 88–97. <https://doi.org/10.62504/jimr822>
- Nurdin, N. (2024). Memahami Isu Gender dan Ketidaksetaraan Gender di Indonesia Pasca Era Reformasi: Perspektif Pembangunan. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(1), 332–343. <https://doi.org/10.55681/jige.v5i1.2239>

- Pellu, A. (2024). Peningkatan Akses Keuangan: Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif. *Currency: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(2), 279–295. <https://doi.org/10.32806/ffyp8n53>
- Rafiuddin, R., Syarifuddin, S., Saparuddin, S., Nurjihadin, N., & Rahmat, F. A. G. (2024). SLR: Discovering STEAM Integrated Science Disciplines for Learning Planning for Primary School Students in Indonesia Towards the Era of Society 5.0. *Scientica Education Journal*, 1(5), 10–45. <https://doi.org/10.62872/5aqcnd04>
- Rifatin, L., & Pramesti, W. (2024). Analisis K-Means Cluster pada Pengelompokan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Faktor yang Mempengaruhi IDG. *CAKRAWALA*, 18(1), 75–92. <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v18i1.536>
- Rofatunnisa, S., & Usman, H. (2024). Capaian Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Dan Ketimpangan Gender Di Indonesia: Analisis Persamaan Simultan Data Panel. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 14(1), 15–32. <https://doi.org/10.22212/jekp.v14i1.2530>
- Safitri, A. O., Yuniarti, V. D., & Rostika, D. (2022). Upaya Peningkatan Pendidikan Berkualitas di Indonesia: Analisis Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). *Jurnal Basicedu*, 6(4), 7096–7106. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i4.3296>
- Saha, T., & Singh, P. (2025). Role of Labor Market Dynamics in Influencing Global Female Labor Force Participation. *Journal of Economic Studies*, 52(1), 17–37. <https://doi.org/10.1108/JES-11-2023-0633>
- Saputri, I. E., Dhewantoro, H. N. S., Azizah, P. I., & Utami, P. S. (2024). Tantangan dan Perwujudan Gender Equality Sebagai Realitas Sosial serta Implikasinya dalam Pembangunan di Indonesia. *MAHARSI: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Sosiologi*, 6(1), 14–25. <https://doi.org/10.33503/maharsi.v6i1.3997>
- Serena, S. D., Chasanah, N., & Auliya, I. (2024). Mendukung Sustainable Development Goals: Studi Literatur Kebijakan Sistem Pendidikan China, Finlandia, Jepang, dan Indonesia. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 5(1), 1225–1237. <https://doi.org/10.54373/imeij.v5i1.689>
- Setiani, S. A., Saleh, S. E., & Payu, B. R. (2024). Analisis Indeks Pembangunan Gender Di Kawasan Teluk Tomini Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya. *Jurnal Studi Ekonomi Dan Pembangunan*, 1(3), 127–137. <https://doi.org/10.37905/jsep.v1i3.23842>
- Setyonaluri, D., & Utomo, A. (2024). Negotiating Work, Family, and Traffic: Articulations of Married Women’s Employment Decisions in Greater Jakarta. *Gender, Work & Organization*, 31(6), 2423–2445. <https://doi.org/10.1111/gwao.13069>
- Sharma, R., Katoha, H. A., & Gul, S. (2023). Mainstreaming Women in Sustainable Development Projects in Pakistan. *Journal of Development and Social Sciences*, 4(4), 530–538. [https://doi.org/10.47205/jdss.2023\(4-IV\)47](https://doi.org/10.47205/jdss.2023(4-IV)47)
- Sofa, W. A., & Eschachasthi, R. (2024). Digital Adoption and Women in The Labor Market: Indonesia’s Case. *Journal of Developing Economies*, 9(1), 65–83. <https://doi.org/10.20473/jde.v9i1.39475>
- Wihardja, M. M., & Pradana, A. T. (2024). Examining The Drivers of Changes in Mean Earnings and Earnings Inequality in Indonesia. *Asian Economic Journal*, 38(2), 232–255. <https://doi.org/10.1111/asej.12332>
- Yunara, E., Yeni, I., & Irfan, M. I. (2023). Pengaruh Pemberdayaan Perempuan Dalam Ekonomi Dan Politik Terhadap Pembangunan Perempuan di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 5(2), 79–88. <https://doi.org/10.24036/jkep.v5i2.14862>
- Yuslin, H. (2021). Pembuktian Strategi Pengarusutamaan Gender (PuG): Analisis Capaian Indeks Pemberdayaan Gender di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Statistik Indonesia*, 1(3), 162–170. <https://doi.org/10.11594/10.11594/jesi.01.03.04>